

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap Negara. Salah satu yang menjadi faktor penghalang atau penghambat yaitu salah satunya kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang dialami semua negara di dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang akan tetapi negara maju pun merasakan walaupun jumlahnya tidak sebesar di negara berkembang atau negara terbelakang.

Kemiskinan telah membatasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang baik dan kesehatan yang terjamin, oleh karena itu pemerintah harus berupaya untuk melakukan pengawasan. Dari hal ini pemerintah mengupayakan untuk mengatasi kemiskinan dan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini sudah diatur dalam Undang-Undang Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Pasal 3 No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Permensos Pasal 3 No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dimana isinya adalah “Sasaran PKH merupakan Keluarga dan /atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan / atau kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan mempunyai arti penting yaitu merupakan Program pemberian bantuan sosial bersyarat Kepada Keluarga Miskin dari pemerintah untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM). Dimana tujuan dari Program ini antara lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah memberikan bukti bahwa angka kemiskinan di Indonesia Pada Bulan Maret 2006 sebelum PKH dijalankan sebesar 17,75% dan turun menjadi 16,58 % pada Maret 2007 sedangkan pada tahun 2018 ini berhasil menjadi 9,82 % oleh hal ini pemerintah terus berupaya melakukan yang terbaik agar program ini bisa sukses. Program pemerintah ini memerlukan adanya suatu sistem pengawasan yang baik dan efektif agar penyaluran program ini tepat kepada sasaran. (<http://m.detik.com/news/berita/725038/kemiskinan-2006-meningkat-jadi-178>).

Pengawasan yang efektif akan memberikan suatu dampak yang baik bagi tujuan program pemerintah dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di tiap tingkat kecamatan maka tingkat kemiskinan dapat diminimalisirkan dari adanya PKH ini. Menurut Dale (dalam Winardi 2004:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawas tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Pengawasan sangat dibutuhkan dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) agar tepat sasaran dan program ini merupakan suatu bentuk kepedulian dari pemerintah. Dan sebagai wadah partisipasi dari program ini pemerintah bekerjasama dengan kecamatan untuk mensukseskan program ini tentunya pengawasan yang baik dari internalnya agar program ini terlaksana sesuai dengan tujuan.

Hal ini untuk mencapai suatu tujuan setiap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap maksimal karena didalamnya ada sebuah bentuk pengawasan dari atasan / pimpinan agar hasil yang dicapai bisa maksimal dan dijalankan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari penyimpangan atau penyelewengan terhadap suatu kegiatan yang telah diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Dimana peneliti menggunakan Teori Pengawasan dari Dessler dalam (Sulle dan Saefullah 2019 : 286-287) dimana teori ini terdapat 2 sistem pengawasan Tradisisonal dan Komitmen

Suatu sistem pengawasan yang efektif harus dilakukan dengan benar dan jelas hal ini bertujuan untuk menghindari penyelwengan atau penyimpan yang terjadi di dalam sebuah organisasi atau instansi agar pelaksanaan keseluruhannya dapat sesuai dan mendekati apa yang telah direncanakan sebelumnya. Program PKH ini program pemerintah, salah satunya kecamtan plered yang sudah mengimplementasikan program ini dimana terdiri dari 10 desa dan salah satu desa penerima PKH ini yaitu Desa Wotgali.

Seiring dengan Padatnya penduduk di Kecamatan Plered maka semakin tinggi jumlah angka pemberian bantuan sosial bersyarat dari pemerintah untuk masyarakat sehingga pengawasan yang dilakukan belum optimal karena salah satu faktornya yaitu :

1. Pengawasan ini belum tepat sasaran dalam melakukan pendataan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai penerima manfaat PKH.
2. Adanya kesalahan memfungsikan dana PKH yang diberikan kepada RTSM untuk hal hal tidak dianjurkan dalam program PKH, seperti tidak dipergunakan untuk memenuhi kewajiban terkait dengan pendidikan dan kesehatan.

Dimana program pemerintah ini dapat membantu dan meringankan beban keluarga dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Untuk hal ini pemerintah dituntut untuk memberikan pengawasan yang baik serta adil. Sehingga masyarakat tidak mempunyai 4oordin untuk tidak sekolah, kekurangan sandang, pangan, papan, hal ini sebagai wujud untuk mencapai tujuan masyarakat untuk hidup makmur dan jauh dari kemiskinan. Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan pengawasan yang baik karena hal tersebut akan berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengawasan Camat dalam Meningkatkan Validitas Pendataan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Desa Wotgali Kecamatan Plered)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang penelitian yang telah di kemukakan diatas sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **“Pengawasan Camat dalam Meningkatkan Validitas Pendataan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kecamatan Kabupaten Plered (Studi Kasus Desa Wotgali) belum optimal”**

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas tersebut penulis mengemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan dalam melakukan validitas pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kecamatan Plered?
2. Faktor-faktor yang mendukung Pengawasan pada saat melakukan pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kecamatan Plered ?
3. Faktor-faktor yang pengahmbat Pengawasan pada saat melakukan pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kecamatan Plered ?
4. Upaya apa saja yang dilakukan Kecamatan Plered dalam meningkatkan Program Keluarga Harapan (PKH) ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kecamatan Plered.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung Pengawasan pada saat Pendaatan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kecamatan Plered.
3. Untuk mengetahui factor penghambat Faktor-faktor yang mendukung Pengawasan pada saat melakukan pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kecamatan Plered ?
4. Untuk mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan Kecamatan Plered dalam meningkatkan Program Keluarga Harapan (PKH)

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

1. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan pendekatan langsung kepada Kecamatan Plered mengenai Pengawasan Langsung melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Mengembangkan Ilmu dan Wawasan mengenai Pengawasan Camat dalam Meningkatkan Program Keluarga Harapan di Kantor Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

1.5.2 Kegunaan Penelitian secara Praktis

1. Untuk memperbaiki dan meningkatkan Keberhasilan Pengawasan Camat dalam Meningkatkan Validitas Pendataan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kecamatan.
2. Untuk memperbaiki pemahaman mengenai Pengawasan Program Keluarga Harapan di Kantor Kecamatan Plered dan memberikan evaluasi bagi pendamping PKH dalam menentukan calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Sule dan Saefullah (2019: 263) mengatakan bahwa :

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan lebih banyak digunakan dalam bahasa Indonesia akan tetapi, dikarenakan fungsi manajemen yang diperlukan tidak hanya pengawasan, namun mencakup juga penetapan standar kinerja, pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan koreksi standar kinerja menyimpang dari semestinya.

Lebih lanjut Schermerhon (2002 dalam Sule dan Saefullah (2019:263) pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Dalam pengawasan seperti dikatakan oleh Schermerhon bahwa pengawasan yaitu pengambilan tindakan atau kegiatan untuk mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan.

Gilbert (2000 dalam Sule dan Saefullah 2019: 263)

Dimana menurut mereka *control* adalah *the process of ansuring that actual activities conform the planned activities*. Jadi, pengawasan adalah untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dalam pengawasan dimana segala aktivitas sudah terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Mockler (2000 dalam Sule dan Saefullah 2019:264).

Secara lengkap menguraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.

Dalam Mockler dimana suatu pengawasan ditentukan oleh adanya waktu ke waktu terkait standar yang telah ditentukan untuk mencapai suatu pencapaian yang telah ditentukan.

Menurut Henry Fayol dalam Besse Marhawati (2018:9) Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut.

Dimana penjelasan menurut pakar dari Henry Fayol mengemukakan bahwa pengawasan harus diteliti agar segala sesuatu yang telah direncanakan dan ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijalankan.

Sujanto dalam Besse Marhawati (2018:10) mendefinisikan pengawasan merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya.

Dimana dalam sebuah pengawasan lebih menilai dari suatu kenyataan yang sebenarnya apakah melaksanakan yang sudah dilimpahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pegawai sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh pimpinan dan disini pimpinan perlu mengetahui dan menilai kerja dari para pegawainya.

Dessler (dalam Sule dan Sefullah 2019 : 286-287) berpendapat dalam model pendekatannya, terdapat dua dimensi yang sangat menentukan keberhasilan dari sebuah pengawasan, yaitu:

Bahwa Dessler berpendapat ada 2 sistem pengawasan dalam melakukan sistem pengawasan agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan hasil maksimal maka disebutkan 2 sistem pengawasan.

1. Sistem Pengawasan Tradisional

Sistem pengawasan Tradisional adalah upaya untuk mempertahankan fungsi pengawasan melalui prosedur dan kegiatan yang melibatkan penentuan standard an berbagai upaya untuk mencapai standar tersebut.

a. Pengawasan diagnostik

Pengawasan ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh manejer di mana setelah standar ditetapkan, manajer melakukan pengawasan dan penilaian apakah standar telah dicapai atau belum.

b. Pengawasan berdasarkan batasan

Pengawasan berdasarkan batasan adalah pengawasan yang dilakukan melalui penetapan aturan atau prosedur yang dengan aturan dan prosedur tersebut keseluruhan anggota dan pihak yang terkait dengan perusahaan akan menyesuaikan diri dengan aturan dan prosedur tersebut dalam menjalankan seluruh aktivitas yang terkait dengan perusahaan.

c. Pengawasan interaktif

Pengawasan yang dilakukan oleh manajer yang secara interaktif dan terus –menerus melakukan komunikasi dengan pegawai secara personal mengenai berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan.

2. Sistem Pengawasan yang berdasarkan Komitmen

Pendekatan yang berdasarkan komitmen lebih menekankan fungsi dari pengawasan dari sisi internal daripada eksternal. Sehubungan dengan hal tersebut, fungsi pengawasan yang berdasarkan komitmen mendasarkan sistem pengawasan kepada kessadaran dari setiap individu atau pekerjaan apa yang terbaik yang seharusnya ditunjukan oleh mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan.

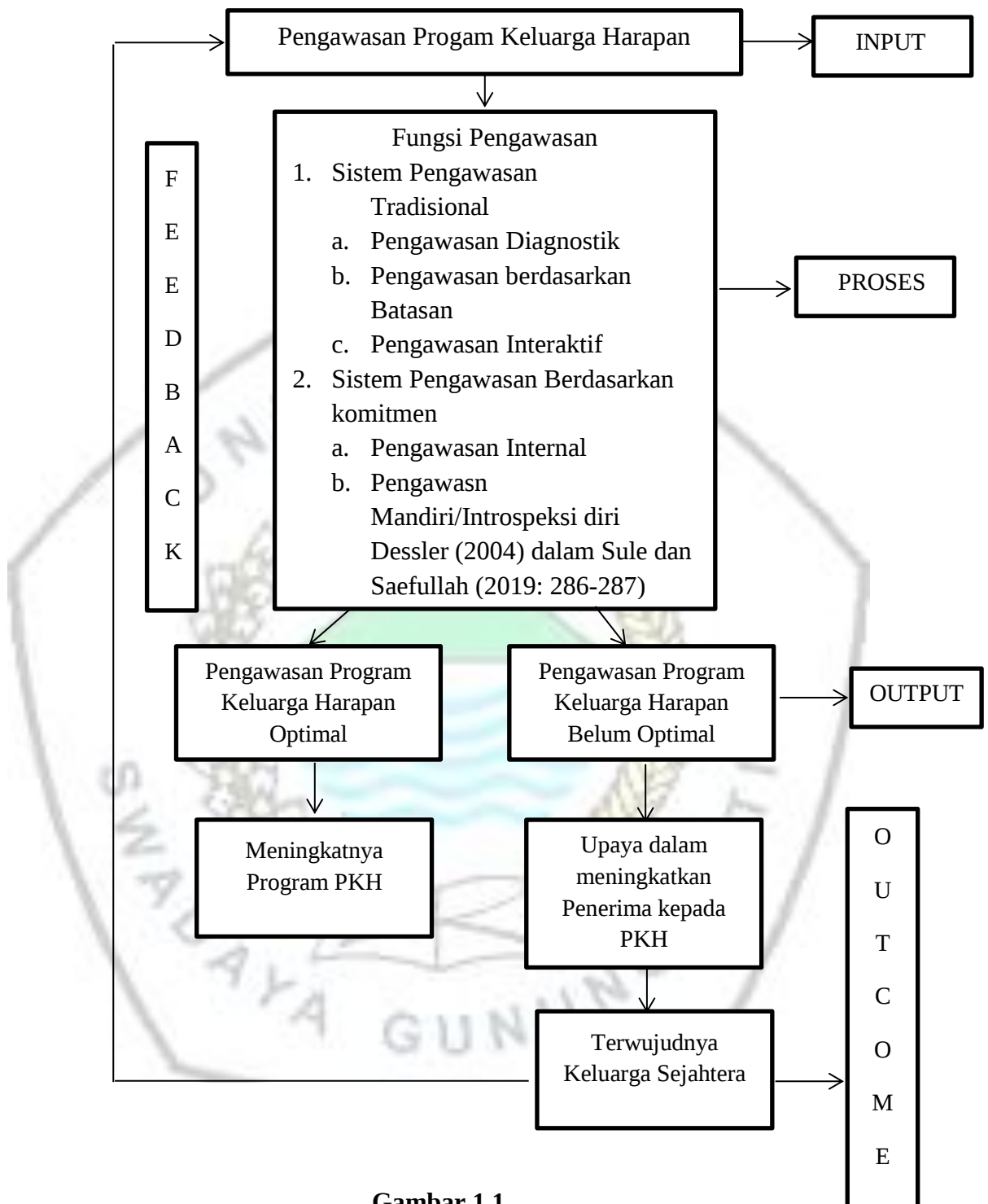
a. Pengawasan Internal

Dari sisi pengawasan internal diharapkan para pegawai bertanggung jawab dan intropeksi diri. Dengan adanya upaya pembiasaan para pegawai untuk bertanggung jawab atas kepercayaan dan kewenangan berbagai aktivitas dan melakukan intropeksi diri sekiranya ada berbagai penyimpangan yang mungkin dilakukan.

b. Pengawasan Mandiri/ Intropeksi diri

Pengawasan mandiri atau intropeksi diri oleh setiap individu diyakini akan mampu mempertahankan sistem pengawasan dalam jangka panjang, dikarenakan para pegawai akan terbiasa dengan budaya kerja yang produktif dan independen sehingga standar kinerja perusahaan akan diupayakan untuk dicapai oleh para pegawai bukan karena sebuah keterpaksaan, akan tetapi karena adanya kesadaran bahwa perusahaan merupakan milik para pegawai yang harus diperbaiki secara terus- menerus sehingga dapat menjadi yang terbaik.





Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi Operasional Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Penelitian ini adalah Pelaksanaan Pengawasan Camat dalam Meningkatkan Validitas Pendataan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Desa Wotgali). Dalam hal ini penulis menjelaskan kembali untuk menambahkan pemahaman, agar tidak menjadi kesalah pahaman antara penulis, pembimbing dan penguji skripsi.

1. Pengawasan adalah suatu bentuk atau upaya untuk mengawasi dalam suatu kegiatan atau aktivitas agar sesuai dengan kenyataan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Camat adalah pimpinan dari suatu perangkat daerah kabupaten atau kota yang mempunyai wewenang sebagai koordinator dalam sebuah instansi pemerintahan.
3. Program Keluarga Harapan (PKH) dimana Program ini merupakan program dari pemerintah berupa bantuan uang tunai kepada penerima PKH yaitu Keluarga Sangat Miskin (KSM) baik berupa bantuan dana pendidikan dan bantuan meningkatkan kesehatan dan gizi dengan tujuan dari pemerintah agar meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan agar tercipta keluarga yang sejahtera.
4. Kecamatan Plered adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten Cirebon.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep-konsep penelitian variabel penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan, dimensi tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikator.

Untuk memudahkan maka aspek kajian penelitiann yaitu pengawasan yang dioperasikan atau dijabarkan kedalam parameter dan indikator seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
	1. Sistem Pengawasan Tradisional	
	a. Pengawasan Diagnostik	- Melakukan pengawasan dan penilaian apakah standar sudah tercapai. - Pencapaian standar harus sesuai yang diterapkan.
Pengawasan Dessler (2004) (dalam Sule dan Saefullah 2019: 286-287)	b. Pengawasan berdasarkan Batasan	- Melakukan prosedur operasi standar. - Kode etik para pekerja.
	c. Pengawasan Interaktif	- Melakukan komunikasi dengan pegawai. - Lebih efektif untuk SDM di perusahaan.
	2. Sitem Pengawasan berdasarkan Komitmen	
	a. Internal b. Pegawai Mandiri/ Intropkesi diri	- Intropkesi diri dan tanggung jawab individu pegawai. - Para pegawai harus terbiasa dengan budaya kerja yang produktif.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang digunakan

Dalam Penelitian ini peneliti mengemukakan metode penlitian yaitu metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian Kualitatif peneliti melakukan penelitian dengan cara yaitu menggambarkan masalah-masalah yang strategis saat penelitian dilakukan.

Denzim dan Lincoln 1987 dalam (Moleong 2017:5) mendefinisikan bahwa penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam metode penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Ternyata ini hanya mempersoalkan satu metode yaitu wawancara terbuka, sedang yang penting dari definisi ini mempersoalkan apa yang diteliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang.

Menurut Sugiyono (2012: 9), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah: “Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi.”

Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena ingin menggali, mendeskripsikan, menjelaskan serta memaparkan mengenai Pengawasan Camat dalam Meningkatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

1.8.2 Informan Dan Teknik Pemilihan Informan

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, dimana informan dipilih dengan pertimbangan khusus dari peneliti, dengan mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisa dalam penelitian ini. Informan penelitian ini adalah terdiri dari:

a. Informan Kunci

1. Camat Plered Kabupaten Cirebon
2. Kuwu Desa Wotgali

b. Informan pendukung

1. Kasi Kesra (Kesehatan Masyarakat) di Kantor Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon
2. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Staff Desa
4. Masyarakat penerima PKH

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang strategis dalam suatu penelitian. Karena dari tujuan utama penelitian yaitu memperoleh data.

Sugiyono (2012 : 225) mengemukakan bahwa:

“Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.”

Teknik sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini meliputi mencari data informasi melalui buku referensi dan bahan-bahan referensi lainnya seperti perpustakaan dan internet.

2. Studi Lapangan

1. Observasi, yaitu menggunakan teknik pengamatan langsung di lokasi penelitian

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan dan Tanya jawab langsung dengan informan kunci yaitu Camat Plered Kabupaten Cirebon.

3. Dokumentasi, yaitu kegiatan dalam bentuk catatan penulis, bigrafi, sejarah dan dokumen dalam bentuk gambar / foto yang relavan dengan masalah yang diteliti.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada informan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada Camat Plered Kabupaten Cirebon.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersedia sebagai referensi dan acuan penulis, seperti bahan-bahan referensi, studi kepustakaan melalui literatur yang dibutuhkan bagi penulis.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan dalam rangka memperoleh data yang dapat dipercaya dan kebenarannya dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Sugiyono (2012: 270) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas interbal), *transferebility* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confitmability* (obyektivitas).

Penulis melakukan keabsahan data dengan melakukan teknik triangulasi.

Wiliam Wiersma (dalam Sugiyono 2012: 273) menyatakan bahwa:

Triangulation is qualitative cros- validation. It asseses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple

data sources or multiple data collection procedures. Triangulasi dalam pengujian kredabilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Alasan penulis menggunakan teknik triangulasi adalah dengan cara teknik ini dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi yang ada dalam konteks suatu studi pada waktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Adapun cara yang digunakan dalam triangulasi ini yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dengan informan.
2. Menbandingkan secara umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang saling berkaitan.

Pengecekan data dilakukan memastikan bahwa data yang sudah diperoleh adalah akurat dan valid, maka dilakukan validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan memberikan pertanyaan yang sama pada informan yang berbeda terhadap data maupun informan dari hasil wawancara.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Data akan dianalisis dengan menggunakan metode Model Miles and Huberman, yaitu analisis data penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Dalam analisis model data Miles and Huberman dalam (Sugiyono 2012: 246-253) diantaranya :

1. Reduksi Data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan terperinci.
2. Data Display (Penyajian Data), setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.
3. Verification, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
4. Kesimpulan, dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Penelitian melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena:

1. Adanya masalah program PKH dari pemerintah.
2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian baik berupa dokumen atau wawancara dan pengamatan
3. Lokasi penelitian mudah terjangkau karena secara geografis berada di wilayah kabupaten Cirebon dan dekat dari rumah.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Penelitian dijadwalkan selama 6 Bulan terhitung dari Bulan Maret sampai Agustus 2020, yang terbagi dalam jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

[illegible]